

---

## EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA PROGRAM GERDU KEMPLING DI KELURAHAN KEMIJEN KOTA SEMARANG

Nuskhya Asfi<sup>1</sup> Dan Holi Bina Wijaya<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro

<sup>2</sup>Dosen Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Diponegoro  
email : nuskhya.asfi@yahoo.com

**Abstrak:** Masalah terbesar pembangunan ekonomi nasional adalah tingkat kemiskinan yang tinggi. Upaya Pemerintah Kota Semarang untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan (strategi percepatan penanggulangan kemiskinan) yaitu melalui program GERDU KEMPLING (Gerakan Terpadu Di Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan). Gerdu Kempling ini diharapkan dapat membuat angka kemiskinan dari Kota Semarang menurun setidaknya 2% per tahun. Sehingga dampak pelaksanaan program ini tentunya diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama orang miskin. Tujuan penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan melalui Program Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen Kota Semarang. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Hasil dalam penelitian ini merupakan kajian efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan pada Program Gerdu Kempling. Secara umum pemberdayaan masyarakat pada program Gerdu Kempling dalam upaya pengentasan kemiskinan kurang efektif dalam meningkatkan kemandirian masyarakat untuk dapat terlepas dari lingkaran kemiskinan. Proses pemberdayaan masyarakat dalam Gerdu Kempling yang kurang efektif tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas masyarakat yang belum mampu mengambil peran yaitu dalam membuat keputusan atau pilihan yang masyarakat inginkan. Secara umum pemberdayaan masyarakat dalam Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen cukup efektif yaitu 63% dari masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan program Gerdu Kempling mengalami peningkatan kondisi kualitas hidupnya setelah mendapatkan program bantuan Gerdu Kempling.

**Kata kunci:** Efektivitas, Pemberdayaan Masyarakat, Kemiskinan, Program Gerdu Kempling

**Abstract:** The biggest issue of national economic development is the high rate of poverty. Some way have been taken to address the problem of poverty so that the conditions of poverty in Semarang are relatively low compared to other cities in Central Java Province. City Government's effort to accelerate poverty reduction (the acceleration of poverty reduction strategies) is through a program GERDU KEMPLING (Integrated Movement in the Field of Health, Economics, Education, Infrastructure and Environment). GerduKempling is expected to make poverty in Semarang decreased by at least 2% per year. So the expected impact of the implementation of this program would improve the welfare of society, especially the poor. The purpose of this study is to assess the effectiveness of community empowerment in Poverty Alleviation through Gerdu Kempling Program in Kemijen Urban Village, Semarang City. This research is used a quantitative method. The result of this research is study of the effectiveness of community empowerment in poverty allevation in Gerdu Kempling Program. In general, community empowerment in Gerdu Kempling program about poverty alleviation efforts is less effective in enhancing the independence of the community to be apart from the cycle of poverty. Thatless effective of community empowerment process in GerduKempling is mainly due by the capacity of society who have not been able to take the role in making decisions or choices about whatthey want. In general, community empowerment in Gerdu Kempling in Kemijen City Villageis effective enough that 63% of the poor who getting support of Gerdu Kempling Program have increasing the life quality condition.

**Keywords:** Effectiveness, Community Empowerment, Poverty, Gerdu Kempling Program

## PENDAHULUAN

Permasalahan kemiskinan telah menjadi masalah internasional, terbukti PBB telah menetapkan Millenium Development Goals (MDGs) salah satu tujuannya yang hendak dicapai adalah memberantas kemiskinan dan kelaparan, dimana pada tahun 2015 proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan harus dikurangi hingga 50% dari kondisi tahun 1990. Deklarasi MDGs dituangkan pada bulan Oktober 2000 dan disepakati oleh 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang harus diperhatikan dalam pembangunan, sebab salah satu ukuran keberhasilan pembangunan adalah mengurangi kemiskinan. Oleh sebab itu kini telah terjadi pergeseran makna pembangunan dari orientasi yang mengutamakan laju pertumbuhan menuju pemerataan hasil pembangunan.

Kemiskinan merupakan masalah yang pada umumnya dihadapi hampir di semua negara-negara berkembang, terutama negara yang padat penduduknya seperti Indonesia. Masalah kemiskinan dianggap sebagai salah satu faktor yang dapat menghambat pertumbuhan suatu bangsa, termasuk Indonesia. Selama ini pemerintah terus berupaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan melalui berbagai program yang dirancang sedemikian rupa.

Dimensi kemiskinan dalam kehidupan masyarakat muncul dalam berbagai bentuk, antara lain seperti dimensi politik yang terlihat dari tidak adanya wadah organisasi yang mampu memperjuangkan aspirasi golongan miskin. Dimensi sosial terlihat dari tidak terintegrasikannya masyarakat miskin dalam institusi sosial yang ada serta merebaknya budaya kemiskinan yang terus merusak kualitas manusia dan etos kerja masyarakat. Dimensi ekonomi dalam bentuk rendahnya penghasilan masyarakat sehingga mereka tidak mampu untuk memenuhi kebutuhannya. Tingkat kemiskinan yang terus meningkat menyadarkan semua pihak

bahwa pendekatan yang dipilih dalam pembangunan selama ini perlu diperbaiki ke arah pemberdayaan masyarakat.

Pendekatan pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud pembangunan alternatif yang menghendaki agar masyarakat mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. *Empowerment* (pemberdayaan) berasal dari Bahasa Inggris, dimana *power* diartikan sebagai kekuasaan atau kekuatan. Menurut Robert Dahl (1973:50), pemberdayaan diartikan pemberian kuasa untuk mempengaruhi atau mengontrol. Manusia selaku individu dan kelompok berhak untuk ikut berpartisipasi terhadap keputusan-keputusan sosial yang menyangkut komunitasnya. Sedangkan menurut Korten (1992) pemberdayaan adalah peningkatan kemandirian rakyat berdasarkan kapasitas dan kekuatan internal rakyat atas SDM baik material maupun non material melalui redistribusi modal.

Sebagaimana kota-kota lain di Indonesia, sebagai kota yang mengalami perkembangan, Kota Semarang tidak terlepas dari masalah kemiskinan. Berbagai program pengentasan kemiskinan telah dilakukan. Namun dalam perkembangannya, tingkat kemiskinan di Kota Semarang masih cenderung tinggi. Tercatat angka kemiskinan di Kota Semarang mencapai 26,41% dari jumlah penduduk, yaitu sebanyak 111.558 keluarga atau 398 ribu jiwa dari total penduduk sekitar 1.553.778 jiwa (Keputusan Walikota Semarang Nomor 410/370 Tahun 2010 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2010), yang tersebar di 177 kelurahan.

Oleh karena kemiskinan merupakan masalah yang kompleks, maka penanganannya diperlukan partisipasi serta sinergitas dari berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*), yaitu melalui program Gerdu Kempling (Gerakan Terpadu Bidang Kesehatan, Ekonomi, Pendidikan, Infrastruktur dan Lingkungan) yang diluncurkan pada tanggal 24 Maret 2011. Kecamatan Semarang Timur merupakan

salah satu kecamatan di Kota Semarang yang telah melaksanakan Gerdu Kempling yaitu tahun 2012. Daerah penelitian ini adalah paling besar. Kelurahan yang menjadi tujuan penelitian ini adalah kelurahan Kemijen.

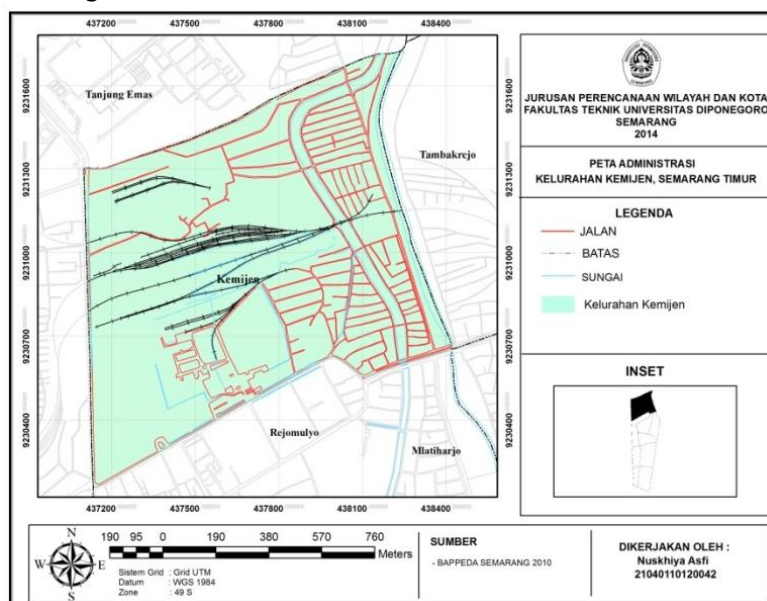
Program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu usaha dalam pengentasan kemiskinan yang melibatkan masyarakat didalamnya. Program Gerdu Kempling dibentuk dengan tujuan utama adalah untuk mengurangi angka masyarakat miskin 2% per tahun. Efektivitas suatu program dapat tercapai apabila programnya tepat sasaran, tujuan tercapai dan berdampak positif bagi masyarakat. Sehubungan dengan hal itu maka perlu dikaji efektivitas program pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kemijen. Berdasarkan kondisi di atas, maka timbul suatu pertanyaan penelitian (*research question*) dalam studi ini, yaitu:

**“Bagaimana efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan Kemiskinan melalui kegiatan Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen?”.**

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji efektivitas pemberdayaan Masyarakat dalam Pengentasan Kemiskinan

salah satu kelurahan di Kecamatan Semarang Timur yang memiliki jumlah keluarga miskin melalui Program Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen Kota Semarang. adapun sasarannya yaitu mengidentifikasi kondisi kemiskinan masyarakat sebelum Program Gerdu Kempling dilaksanakan di Kelurahan Kemijen, mengidentifikasi aspek pemberdayaan masyarakat dalam Program Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen, menganalisis efektivitas pemberdayaan masyarakat program Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen dan merumuskan kesimpulan dan rekomendasi bagi efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan melalui program Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen

Ruang lingkup wilayah penelitian meliputi batas administrasi Kelurahan Kemijen. Kelurahan Kemijen secara administrasi termasuk dalam wilayah Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang. Kelurahan ini terdiri atas 82 (delapan puluh dua) wilayah Rukun Tetangga (RT) dan 11(sebelas) wilayah Rukun Warga (RW). Adapun luas wilayah Kelurahan adalah 141 Ha, dengan batas-batas administrasi dapat dilihat pada gambar 1



Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2010

**Gambar 1**  
**Peta Administrasi Kelurahan Kemijen**

## KAJIAN LITERATUR

### Konsep Efektivitas

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil sesungguhnya dicapai. Menurut Drucker (1964:5), efektivitas didefinisikan sebagai melakukan pekerjaan yang benar (*doing the raight things*), sedangkan efisien adalah melakukan pekerjaan dengan benar (*doing things right*). Dari kedua definisi yang dikemukakan oleh Drucker tersebut, maka jelaslah perbedaan antara efektivitas dengan efisiensi.

Chung & Megginson (1981:506, dalam Siahaan, 1999:17) mendefinisikan efektivitas sebagai istilah yang diungkapkan dengan cara berbeda oleh orang-orang yang berbeda pula. Namun menurut Chung & Megginson yang disebut dengan efektivitas ialah kemampuan atau tingkat pencapaian tujuan dan kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan agar organisasi tetap *survive* (hidup). Tingkat kualifikasi efektivitas menurut Keputusan Menpan No Kep./25/M/MPan/2/2004, sebagaimana yang disajikan pada Tabel II.1

**TABEL 1**  
**TINGKAT KUALIFIKASI EFEKTIVITAS**

No.	Nilai Interval	Tingkat Efektivitas
1	Dibawah 40	Sangat tidak efektif
2	40-59,99	Tidak efektif
3	60-79,99	Cukufektif
4	Diatas 79,99	Sangat efektif

Sumber : SK.Menpan  
No.25/M/MPan/2/2004

Penilaian terhadap tingkat kesesuaian program merupakan salah satu cara untuk mengukur efektivitas program. Efektivitas merupakan kriteria evaluasi yang dapat diukur bilamana suatu kebijakan program dapat mencapai hasil (efek) dan memberi pengaruh yang diinginkan (Sawicki dalam Awita, 1998).

Sementara itu pendapat peserta program dapat dijadikan sebagai ukuran untuk menentukan efektivitas program. Hal

tersebut dinyatakan oleh Kerkpatrick yang dikutip oleh Cascio (1995) bahwa evaluasi terhadap efektivitas program pelatihan dapat dilakukan, diantaranya melalui reaksi peserta terhadap program yang diikuti. Bermanfaatkah dan puaskah peserta pelatihan terhadap program. pelatihan merupakan pertanyaan-pertanyaan yang dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur reaksi peserta terhadap program pelatihan (Tulus,1996).

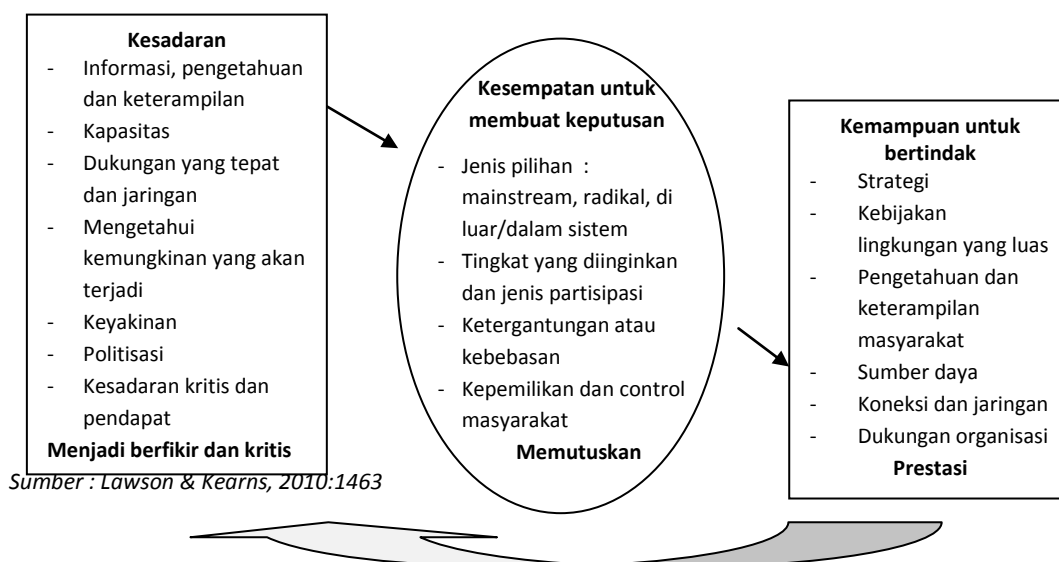
### Pemberdayaan Masyarakat

Secara umum pemberdayaan telah didefinisikan dengan berbagai pendapat. Konsep pemberdayaan mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people-centered, participatory, empowering, and sustainable*" (Chambers, 1995 dalam Kartasmita, 1996). Menurut pendapat akademis pemberdayaan dilihat sebagai masyarakat yang mendapat kontrol. Arti dari kontrol dapat diterapkan untuk konteks tertentu tetapi umumnya menyiratkan pada menentukan pilihan dan kebebasan tindakan bagi orang lain yang terkena dampak (Somerville, 1998 dalam Lawson dan Kearns, 2010:1461). Sedangkan menurut Gibson & Woolcock (2005:1) dalam Adiyoso (2009:23), pemberdayaan sebagai proses untuk meningkatkan kapasitas individu dalam menentukan pilihan dan mewujudkan pilihan tersebut dengan tindakan nyata. Karena itu, World Bank (2001) mengartikan pemberdayaan sebagai upaya untuk memberikan kesempatan dan kemampuan kepada kelompok masyarakat (miskin/tidak berdaya) untuk mampu dan berani bersuara (*voice*) atau menyuarakan pendapat, ide tau gagasan-gagasannya, serta kemampuan dan keberanian untuk memilih (*choice*) sesuatu (konsep, metoda, produk, tindakan, dll) yang terbaik bagi pribadi, keluarga, dan masyarakatnya. Dengan kata lain, pemberdayaan masyarakat merupakan proses meningkatkan kemampuan dan sikap kemandirian masyarakat. Fokus dalam pemberdayaan adalah masyarakat, sehingga pemberdayaan masyarakat sangat tergantung pada aktivitas yang dilakukan

masyarakat dalam suatu kawasan permukiman. Sehingga pemberdayaan didefinisikan sebagai upaya untuk mengembangkan kemampuan sumber daya lokal dan memperluas peran serta masyarakat untuk menjadi aktor utama dalam pengembangan.

Sedangkan menurut Clegg dan Marginn dalam Lawson dan Kearns (2010:1462), pemberdayaan masyarakat muncul karena bentuk kekalahan dan tidak berdaya. Oleh karena itu dikembangkan model pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada teori kekuasaan (*power*). Masyarakat hanya memiliki potensi untuk melakukannya dan kemampuan masyarakat yang menjadi pengaruh yang dapat berfruktifikasi tergantung berbagai faktor yakni kapasitas, kepercayaan, sumber daya dan konteks organisasi sebagai pendukung. Berikut ini model pemberdayaan masyarakat yang dibagi menjadi tiga bagian (lihat gambar 2.1). Untuk diberdayakan, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis, memiliki kesempatan untuk membuat pilihan dan kemampuan untuk bertindak.

Komponen pertama dalam model ini tentang pengembangan kesadaran sehingga masyarakat mampu bersikap kritis dan reflektif tentang apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka mencapai tujuan mereka. Mengembangkan kesadaran dapat membangun praktis dalam hal pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan khusus untuk berbagai keperluan. Faktor-faktor lain seperti dukungan yang tepat (lokal dan organisasional), pengalaman, jaringan dan koneksi, atau yang lebih signifikan dalam hal meningkatkan atau mengembangkan kesadaran (Taylor dkk, 2007 dalam Lawson dan Kearns, 2010:1462). Sebuah dimensi lebih lanjut dalam hal pengembangan kesadaran berasal dari pengembangan masyarakat dan berkaitan dengan pemikiran kritis dan refleksi. Hal ini memerlukan proses “penyadaran” dimana masyarakat mengambil pandangan analitis situasi mereka dalam rangka untuk menentukan alasan sosial, politik dan ekonomi bagi ketidakberdayaan mereka (Freire dan Ledwith dalam Lawson & Kearns, 2010:1462).



Sumber : Lawson & Kearns, 2010:1463

**GAMBAR 2**  
**MODEL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Peluang untuk menentukan pilihan merupakan komponen kedua dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Somerville (1998:253) dalam Lawson dan Kearns (2010:5), menyatakan bahwa dengan kunci

pemberdayaan adalah menempatkan warga atau masyarakat dalam posisi di mana mereka dapat memilih cara yang mereka inginkan untuk perubahan. Ini mungkin melibatkan individu-individu dalam

masyarakat dalam memilih jenis yang mereka sukai dan keterlibatan pada tingkatan partisipasi.

Komponen ketiga adalah melembagakan tindakan berdasarkan keputusan yang dibuat sehingga masyarakat mencapai tujuan mereka yaitu pilihan yang dapat membawa perubahan yang lebih baik. Kemampuan untuk melembagakan tindakan akan tergantung pada jenis dan sifat pilihan yang dibuat, dan juga memiliki kerangka kerja kebijakan yang tepat, sumber daya, organisasi mendukung dan konteks masyarakat yang mendukung yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan koneksi yang tepat/jaringan (Maginn, 2004: 184 dalam Lawson dan Kearns, 2010:5).

Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan di atas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

### **Kemiskinan**

Kemiskinan menunjukkan situasi serba kekurangan yang terjadi bukan karena dikehendaki oleh si miskin, melainkan karena tidak bisa dihindari dengan kekuatan yang dimilikinya (Soegijoko, 1997:137). Bentuk lain dari kekurangan, seperti

kurangnya akses ke air yang aman, sanitasi, kesehatan dan pendidikan, pengetahuan dan pendapatan dasar untuk standar hidup yang layak. The Human Development Report (1997) dalam Akindola (2009:123) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menjadi sarana ampuh untuk mengurangi kemiskinan, namun manfaatnya tidak otomatis. Pada dasarnya, orang miskin harus dididik dan memiliki kesehatan yang relatif baik. Dalam konteks ini, individu perlu kemampuan untuk mengakses pekerjaan yang menguntungkan dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat. Menurut Sen (1999: 87-110) dalam Suyono (2006:11), kemiskinan berada dalam sebuah labirin yang mengeksplicitkan *proverty as capability deprivation* (hilangnya kebebasan). Kemiskinan sama dan sebangun dengan ketiadaan kemampuan dalam seluruh dimensinya. Selain berada dalam tataran ketiadaan kemampuan dalam bidang ekonomi, problema kemiskinan juga berada pada tataran ketiadaan kemampuan dalam bidang sosial, politik, hukum, dan budaya.

Berdasarkan jenisnya kemiskinan secara umum dapat dibagi menjadi kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut terjadi apabila tingkat pendapatan seseorang di bawah garis kemiskinan absolut yang telah ditetapkan, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum yang antara lain terdiri dari kebutuhan sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan. Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Konsep ini dikembangkan di Indonesia di dinyatakan sebagai "*inability of the individual to met basic needs*" (Marwoto, 2005: 97). Bank Dunia (2000) dalam Akindola (2009: 125) menganggap seseorang berada dalam kemiskinan absolut jika konsumsi atau tingkat pendapatan berada di bawah tingkat minimum yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar atau minimum. Sedangkan kemiskinan relatif merupakan perbandingan antara kelompok pendapatan dalam masyarakat tersebut. Meskipun

seseorang/masyarakat telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak (tidak miskin), tetapi masih rendah kualitasnya dibandingkan masyarakat sekitarnya yang relatif lebih kaya (Soegijoko, 1997:138; dan Esmara (1986) dalam Ridlo (2001:10)). Menurut Badan Pusat Statistik (Laksana, 2012:12) kriteria untuk menentukan keluarga/rumah tangga dikategorikan miskin apabila sebagai berikut:

- a. Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m<sup>2</sup> per orang
- b. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bamboo/kayu
- c. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu, kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
- d. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama dengan rumah tangga lain.
- e. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik
- f. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung.sungai/air hujan
- g. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah
- h. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu
- i. Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
- j. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali dalam sehari
- k. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/poliklinik
- l. Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalam petani dengan luas lahan 0,5 ha. Buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp 600.000 per bulan
- m. Pendidikan terakhir kepala rumah tangga: tidak sekolah/tidak tamat SD/tamat SD
- n. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan nilai Rp 500.000 seperti sepeda motor, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Jenis pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian kuantitatif berdasarkan pada filsafat *positivisme* yang memandang realitas/gejala/fenomena itu dapat diklasifikasikan, relative tetap, konkrit, teramati, dan hubungan gejala bersifat sebab akibat. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kualitatif dan data kuantitatif yang diperoleh melalui pengumpulan data dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait, wawancara mendalam kepada pihak terkait serta melalui penyebaran kuisioner. Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah secara sengaja dan bertujuan (*purposive sampling*), karena dalam penelitian ini responden yang dipilih adalah masyarakat yang mendapatkan program Gedru Kempling. Penentuan jumlah sampel dalam suatu penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh teknik pengambilan data (Singarimbun, 1995:14). Dalam menentukan besarnya sampel, apabila populasi kurang dari 100, maka lebih baik seluruh populasi dijadikan sampel. Sedangkan jika lebih dari 100, maka dapat diterapkan antara 15%-20% atau 25%-30% (Arikunto dalam Devi, 2003:16). Berdasarkan pedoman tersebut, jumlah populasi dalam penelitian ini yang menjadi target penyebaran kuisioner berjumlah 40 KK jadi seluruh anggota populasi menjadi responden.

Teknik analisis yang digunakan adalah scoring, deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif ini digunakan untuk memberikan gambaran terkait obyek penelitian yang akan diolah dengan menggunakan cara-cara penyajian grafik, diagram beserta interpretasinya. Analisis skoring dilakukan dengan memberikan nilai kepada indikator-indikator dalam menentukan kondisi kemiskinan responden sebelum program. Kategori skoring variabel kemiskinan dapat dilihat pada (Tabel 2)

## METODE PENELITIAN

**TABEL 2**  
**SKORING VARIABEL KEMISKINAN**

Indikator	Kriteria	Skor	Keterangan
Pendapatan	≤ Rp 600.000,00/bulan	1	Kriteria masyarakat miskin menurut BPS
	Rp 700.000- Rp 1.000.000	2	
	≥ Rp 1.000.000	3	
Mata Pencapaian	Tidak bekerja dan atau bekerja tidak tetap	1	Hasi analisa penyusun
	Pedagang/wiraswasta	2	
	Buruh (bangunan, tani)/Pedagang	3	
Tabungan	Apabila tidak memiliki tabungan, dan rumah tangga memiliki pinjaman	1	Hasil analisa penyusun
	Apabila Tidak memiliki tabungan dan rumah tangga tidak memiliki pinjaman	2	
	Apabila memiliki tabungan dan tidak memiliki pinjaman	3	
Kesehatan	1 kali makan/hari	1	Hasil Analisis Penyusun
	2 kali makan/hari	2	
	3 kali lebih makan/hari	3	
Pendidikan	Tidak Sekolah/ tidak tamat SD	1	Hasil Analisa Penyusun
	Tamatan SD	2	
	Tamatan SMP/SMA	3	
Santasi	Tidak memiliki fasilitas jamban pribadi	1	BPS, Hasil Analisa Penyusun
	Memiliki jamban dengan kondisi tidak layak	2	
	Memiliki jamban dengan kondisi layak	3	
Air Bersih	Sumber air minum dari sungai, sumur atau sumber air yang tidak aman	1	BPS, Hasil Analisa Penyusun
	Sumber air minum dari membeli	2	
	Sumber air minum dari PDAM	3	
Rumah	Luas lantai rumah ≤ 8 m <sup>2</sup> /orang	1	BPS dan Hasil Analisa Penyusun
	Luas lantai 9 m <sup>2</sup> – 12 m <sup>2</sup> /orang	2	

Gerdu Kempling yaitu penduduk sangat miskin, penduduk miskin dan penduduk

Indikator	Kriteria	Skor	Keterangan
	Luas lantai ≥ 12 m <sup>2</sup> /orang	3	
Jenis Lantai	Tanah/kayu	1	BPS dan Hasil Analisa Penyusun
	Plester	2	
	Keramik	3	
Jenis Dinding	Kayu/bambu	1	BPS dan Hasil Analisa Penyusun
	Tembok tanpa plester	2	
	Tembok beton	3	
Bahan bakar memasak	Kayu bakar/arang	1	BPS dan Hasil Analisa Penyusun
	Minyak tanah	2	
	Gas	3	

Sumber: Analisis Penyusun, 2014

### ANALISIS EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGENTASAN KEMISKINAN PADA PROGRAM GERDU KEMPLING

*Analisis kondisi kemiskinan masyarakat penerima manfaat sebelum program Gerdu Kempling*

Berdasarkan hasil analisis kemiskinan dengan menggunakan 14 kriteria menentukan masyarakat miskin menurut BPS, terlihat bahwa kondisi responden atau masyarakat penerima manfaat sebelum program Gerdu Kempling termasuk dalam kategori rawan miskin. Dari tingkat pendapatan mereka masuk pada kategori sedang karena sebagian besar masyarakatnya berpendapatan berkisar antara Rp 700.000,00 – Rp. 1.000.000,00. Sebagian dari mereka bekerja pada sektor informal yaitu pedagang/wiraswasta. Pendidikan kepala rumah tangga yang rendah mengakibatkan kurangnya ketrampilan mereka dalam mengakses pekerjaan.

Pada Keputusan Walikota Semarang Nomor 400/451 tahun 2011 tentang Penetapan Warga Miskin Kota Semarang Tahun 2011 terdapat 3 kategori penduduk yang mendapatkan bantuan dari program rawan miskin. Sehingga masyarakat penerima manfaat program Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen sudah sesuai mendapatkan bantuan dari program



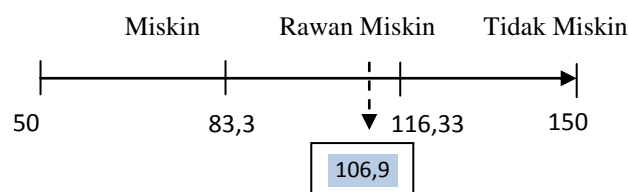
tersebut karena masuk dalam kategori penduduk rawan miskin.

Jumlah skor tertinggi :  $3 \times 50 = 150$

Jumlah skor terendah :  $1 \times 50 = 50$

Jarak interval :  $(150-50)/3 = 33,33$

Maka secara kontinum dapat digambarkan sebagai berikut :



Sumber : Analisis Penyusun, 2014

Indikator	Kondisi Baik			Kondisi Sedang			Kondisi Buruk			$\sum Skor$	Kategori
	F	b	f x b	F	b	f x b	F	b	f x b		
Pekerjaan	5	3	15	37	2	74	8	1	8	97	Sedang
Pendapatan	1	3	3	24	2	48	25	1	25	76	Rendah
Pendidikan	14	3	42	32	2	64	4	1	4	110	Sedang
Kesehatan	50	3	150	0	2	0	0	1	0	150	Tinggi
Kondisi lantai bangunan	5	3	15	39	2	78	6	1	6	99	Sedang
Luas lantai bangunan	4	3	12	39	2	78	7	1	7	97	Sedang
Jenis tembok	6	3	18	37	2	74	7	1	7	99	Sedang
Bahan bakar memasak	50	3	150	0	2	0	0	1	0	150	Tinggi
Kondisi sanitasi	0	3	0	40	2	80	10	1	10	90	Sedang
Kondisi air minum	35	3	105	6	2	12	9	1	9	126	Tinggi
Kepemilikan Aset financial	11	3	33	10	2	20	29	1	29	82	Rendah
<b>TOTAL</b>										<b>106,91</b>	<b>Rawan Miskin</b>

Sumber : Analisis Penyusun, 2014

#### Analisis Proses Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Gerdu Kemping

Analisis pemberdayaan masyarakat dalam program Gerdu Kemping untuk mengetahui aspek pemberdayaan apa saja yang berpengaruh dalam program Gerdu Kemping. Analisis pemberdayaan masyarakat meliputi analisis kesadaran masyarakat, kesempatan untuk menentukan pilihan dan kemampuan bertindak pada pendekatan Tribina (manusia, lingkungan dan usaha) di program Gerdu Kemping. Hal ini karena keberhasilan program pemberdayaan dapat dilihat dari keberhasilan pemerintah dalam melaksanakan proses pemberdayaan

masyarakat program Gerdu Kemping tersebut

##### 1. Kesadaran

Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dapat memobilisasi tindakan bagi perubahan. Proses pemberdayaan yang dilakukan didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat namun belum dimanfaatkan secara optimal. Olehnya itu, langkah pertama yang dilakukan adalah menumbuhkan keinginan pada diri seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal perlunya pemberdayaan.

Bentuk penyadaran yang dilakukan adalah dengan mengundang masyarakat penerima manfaat untuk hadir pada pertemuan/sosialisasi yang diprakarsai oleh

TKPKD di Kelurahan Kemijen. Hasil yang diharapkan dari proses sosialisasi adalah dimengerti dan dipahaminya secara utuh tentang konsep-konsep, prinsip prosedur, kebijakan, tujuan dan tahapan-tahapan dalam pelaksanaan program Gerdu Kemping oleh sasaran penerima program.

Dari hasil wawancara dengan narasumber, didapat keterangan bahwa komunikasi yang terjalin di antara para agen pelaksana program dan warga miskin sebagai penerima manfaat masih sangat kurang. Sosialisasi program hanya dilakukan sekali sebelum program terlaksana sehingga terjadi kurang sinkronisasi bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat dengan bantuan yang telah diberikan.

Penyadaran ini dilanjutkan dengan pemberian pelatihan ataupun kursus singkat yang akan menambah keterampilan mereka seperti pelatihan boga, salon, pelatihan pengolahan pangan dll. Disamping itu, pada pelatihan-pelatihan yang diberikan, disajikan pula materi mengenai pengelolaan (manajemen) usaha yang baik yang akan menambah kepercayaan masyarakat miskin bahwa usaha ini memang prospektif untuk dikembangkan dan akan menambah penghasilan mereka serta membantu mereka untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.

Pada dasarnya, proses penyadaran yang akan dilakukan memiliki potensi untuk berhasil. Hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dalam setiap rapat dan kegiatan pelatihan yang dilaksanakan. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu bagian dari prinsip-prinsip pemberdayaan yang dikemukakan oleh Rappaport, et al yang dirangkum dalam Suharto (2010) yaitu masyarakat harus turut andil berpartisipasi dalam pemberdayaan masyarakat mereka sendiri dan mereka harus mampu merumuskan tujuan, cara dan hasil. Ersing (2010) juga menambahkan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci terjadinya keberlanjutan kondesepsi masyarakat dalam memilih jenis yang mereka sukai dan keterlibatan pada tingkatan partisipasi.

dari pemberdayaan masyarakat. Kehadiran masyarakat miskin dalam kegiatan penyadaran ini akan menjadi tolok ukur keberhasilan program, karena merupakan bentuk keinginan masyarakat untuk mengembangkan dirinya.

Dalam pelatihan yang diberikan dari pemerintah ataupun swasta, tidak semua masyarakat miskin penerima manfaat hadir dalam kegiatan tersebut. Hal ini disebabkan karena warga miskin penerima manfaat sebagian besar bekerja pada sektor informal. Pendapatan yang mereka dapatkan tidak menentu setiap harinya. Sehingga jika mereka tidak bekerja sehari hanya untuk mengikuti pelatihan atau ketrampilan, mereka tidak dapat uang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Berikut ini bentuk kegiatan dalam upaya pemberdayaan manusia (Tabel 3).

**TABEL 3**  
**JENIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MANUSIA**  
**KELURAHAN KEMIEN**

No.	Jenis Kegiatan	Pengampu
1	Pelatihan Kewirausahaan Boga	Bapermasper KB
2	Pelatihan Montir	Bapermasper KB
3	Palatihan Salon	Bapermasper KB
4	Palatihan Sablon	Disperindag
5	Pelatihan Boga	Disperindag
6	Pelatihan pengolahan pangan	Disperindag
7	Pelatihan Menjahit	Bank BI

*Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2012*

1. Kesempatan dalam Menentukan Pilihan  
Peluang untuk menentukan pilihan merupakan komponen kedua dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Somerville (1998:253) dalam Lawson dan Kearns (2010:5), menyatakan bahwa dengan kunci pemberdayaan adalah menempatkan warga atau masyarakat dalam posisi di mana mereka dapat memilih cara yang mereka inginkan untuk perubahan. Ini mungkin melibatkan individu-individu dalam

Partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan masih sangat kurang. Masyarakat miskin penerima manfaat

kurang berpartisipasi dalam membuat keputusan dalam program Gerdu Kempling. Pemberdayaan Masyarakat melalui program Gerdu Kepling kurang menjadikan masyarakat mampu mengidentifikasi masalah/penyebab kemiskinan dan alternatif penyelesaiannya, mampu mengidentifikasi sumber daya yang tersedia di wilayahnya, mampu memutuskan tindakan yang harus dilaksanakan. Adapun masyarakat yang terlibat aktif adalah kader-kader RW, pengurus BKM, maupun tokoh-tokoh masyarakat tertentu. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa inisiator program hanya melibatkan partisipasi kelompok dominan tertentu dimana kelompok ini belum mampu menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Sedangkan masyarakat yang tidak termasuk pada kelompok dominan berpartisipasi pasif dengan mengetahui apa yang akan terjadi dan yang telah terjadi tanpa memberi tanggapan apapun. Dalam tahap pelaksanaan, terjadi peningkatan tingkat partisipasi masyarakat dimana sebagian besar masyarakat yang tidak terlibat dalam tahap perencanaan mulai terlibat dalam pelaksanaan kegiatan.

## 2. Kemampuan Dalam Bertindak

Komponen ketiga dari pemberdayaan masyarakat adalah melembagakan tindakan berdasarkan keputusan yang dibuat sehingga masyarakat mencapai tujuan mereka yaitu pilihan yang dapat membawa perubahan yang lebih baik. Kemampuan untuk melembagakan tindakan akan tergantung pada jenis dan sifat pilihan yang dibuat, dan juga memiliki kerangka kerja kebijakan yang tepat, sumber daya, organisasi mendukung dan konteks masyarakat yang mendukung yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan koneksi yang tepat/jaringan (Maginn, 2004: 184 dalam dalam Lawson dan Kearns, 2010:5).

Pemberdayaan usaha bertujuan untuk menciptakan wirausaha-wirausaha baru sehingga dapat membuka kesempatan kerja dan mendorong perbaikan pendapatan keluarga. Kegiatan yang dilakukan untuk

memberdayakan usaha adalah dengan pemberian bantuan alat usaha mikro dan kecil. Pemberian alat usaha ini disesuaikan dengan kebutuhan dan usaha yang digeluti oleh masyarakat (penerima manfaat). Diharapkan dengan pemberian alat, dapat meningkatkan usaha dan pendapatan mereka serta membuka lapangan pekerjaan baru. Pemberdayaan usaha ini melanjutkan program yang telah dilakukan pada program pemberdayaan manusia. masyarakat yang mendapatkan pelatihan sebelumnya, mendapatkan bantuan alat yang diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat miskin.

Akan tetapi yang ditemukan dilapangan, sebagian masyarakat mendapatkan bantuan alat usaha yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga miskin sasaran program sehingga bantuan terkesan salah sasaran dan kurang efektif. Bantuan yang kurang sesuai dengan apa yang diharapkan warga miskin sasaran program sehingga tidak dapat meningkatkan usaha yang mereka geluti selama ini. Namun, disatu sisi terdapat warga miskin sasaran program yang sudah mendapatkan pelatihan tetapi tidak mendapatkan bantuan alat usaha. Hal tersebut karena terbatasnya bantuan dana dan sarana, baik anggaran dari Pemkot Semarang maupun dari para stakeholders.

Selain itu, permasalahan yang dihadapi masyarakat miskin dalam kemampuan bertindak adalah sumber daya financial masyarakat yang kurang dalam upaya pengembangan usaha yang akan mereka geluti. Sehingga bantuan yang telah diberikan sebelumnya seperti pelatihan dan peralatan usaha terkesan sia-sia karena tidak dimanfaatkan dalam peningkatan pendapatan.

**TABEL 4**  
**JENIS KEGIATAN PEMBERDAYAAN USAHA**  
**KELURAHAN KEMIEN**

No.	Jenis Kegiatan	Pengampu
1	Bantuan Peralatan Sablon	Bapermasper KB
2	Bantuan peralatan Salon	Bapermasper KB

No.	Jenis Kegiatan	Pengampu
3	Bantuan Peralatan Usaha	Disperindag

Sumber: Bappeda Kota Semarang, 2012

*Analisis Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Gerdu Kempling*  
Efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan pada program Gerdu Kempling dinilai berdasarkan peningkatan kondisi masyarakat setelah mendapatkan bantuan dengan pendekatan Tribina (bina manusia, lingkungan dan usaha) dan dihubungkan dengan karakteristik masyarakat serta proses pemberdayaan dalam Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen. Secara kuantitatif dinilai dari besarnya masyarakat yang menyatakan adanya peningkatan kondisi masyarakat

setelah adanya program Gerdu Kempling dan juga besarnya prosentase jumlah responden yang menyatakan ada hubungan antara peningkatan kondisi masyarakat tersebut dengan program Gerdu Kempling.

Efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam pengentasan kemiskinan pada program Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen diperoleh berdasarkan hasil survey tingkat kondisi masyarakat dengan menggunakan kuesioner yang diisi oleh 40 orang responden penerima bantuan di Kelurahan Kemijen, selanjutnya dari hasil pengolahan data terhadap jawaban responden tersebut diperoleh data efektivitas pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Kemijen seperti pada tabel 5.

**TABEL 5**  
**EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM**  
**PENGENTASAN KEMISKINAN PADA PROGRAM GERDU KEMPLING**  
**DI KELURAHAN KEMIEN**

Indikator Pemberdayaan Masyarakat	Kondisi Masyarakat Setelah Program Gerdu Kempling			Presentase Responden yg Menyatakan Peningkatan Kondisi Ada Hub dgn Program Gerdu Kempling (%)	Efektivitas Pemberdayaa n Masyarakat dalam Gerdu Kempling	Keterangan
	Menurun	Tetap	Meningkat			
Pemberdayaan Manusia	0,3	10,7	29	72.3%	<b>Cukup Efektif</b>	Pemberdayaan manusia yang terdiri dari aspek pendidikan dan kesehatan dalam program Gerdu Kempling cukup berpengaruh dalam meningkatkan <i>quality of life</i> masyarakat miskin penerima manfaat program
Pemberdayaan Lingkungan	0	3,3	6,7	66,7%	<b>Cukup Efektif</b>	Pemberdayaan lingkungan yang terdiri dari aspek infrastruktur dan lingkungan dalam program Gerdu Kempling cukup berpengaruh dalam meningkatkan <i>kualitas lingkungan</i> masyarakat miskin penerima manfaat sehingga dalam menjalani hidup sehari-hari masyarakat lebih nyaman dan aman
Pemberdayaan Usaha	0	18	22	50%	<b>Tidak Efektif</b>	Pemberdayaan ekonomi pada program Gerdu Kempling kurang berpengaruh dalam peningkatan

Indikator Pemberdayaan Masyarakat	Kondisi Masyarakat Setelah Program Gerdu Kempling			Presentase Responden yg Menyatakan Peningkatan Kondisi Ada Hub dgn Program Gerdu Kempling (%)	Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Gerdu Kempling	Keterangan
	Menurun	Tetap	Meningkat			
						pendapatan masyarakat miskin penerima program
Nilai Efektivitas				63%	Cukup Efektif	Pemberdayaan masyarakat dalam upaya pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kemijen melalui program Gerdu Kempling cukup efektif. Masyarakat miskin penerima manfaat program merasakan adanya perubahan <i>quality of life</i>

Sumber: Hasil Pengolahan Data dan Kuisioner, 2014

Dari tabel di atas terlihat persentase responden yang menyatakan ada hubungan antara peningkatan tersebut dengan Gerdu Kempling sebesar 63 % hal ini berarti pemberdayaan dalam Gerdu Kempling cukup efektif terhadap peningkatan kondisi pemberdayaan masyarakat atau pengentasan kemiskinan. Adanya bantuan peralatan usaha, perbaikan kondisi infrastruktur, pelatihan atau peningkatan pengetahuan dan ketrampilan bagi masyarakat miskin hanya efektif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, akses terhadap pelayanan kesehatan dan peningkatan infrastruktur masyarakat.

Sedangkan untuk kondisi lainnya tidak efektif, kesungguhan atau konsistensi masyarakat sebagai target atau sasaran yang masih belum baik. Agenda kegiatan yang dijalankan sering kali hanya terkesan aktif saat awal pelaksanaan saja. Dalam temuan di lapangan tidak sedikit masyarakat setelah mendapatkan pelatihan ketrampilan dan bantuan peralatan tidak segera diaplikasikan dalam kehidupannya. Sehingga terkesan program terlaksana hingga pelatihan ketrampilan saja. Selain hal itu juga, bantuan yang tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat untuk mengemabngkan usaha mereka.

Pengaruh dari program Gerdu Kempling bagi masyarakat miskin penerima manfaat di Kelurahan Kemijen paling besar pada pemberdayaan manusia yaitu aspek pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan yang dilakukan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan kesehatan, pendidikan dan juga kualitas masyarakat miskin itu sendiri. Pada peringkat kedua yang mempengaruhi adalah pemberdayaan lingkungan yaitu aspek infrastruktur dan lingkungan. Perbaikan infrastruktur yang dilaksanakan di Kelurahan Kemijen yaitu perbaikan MCK komunal. Sedangkan perbaikan pada aspek lingkungan yaitu perbaikan rumah kurang berpengaruh, karena bentuk bantuan rehabnya hanya sebagian saja sehingga rumah masih kurang layak. Sehingga program ini kurang berpengaruh terhadap peningkatan kualitas perumahan masyarakat miskin yang ada. Pemberdayaan ekonomi kurang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kemijen. Dari hal tersebut, maka beberapa aspek yang dianggap kurang berpengaruh dan perlu dilakukan perbaikan adalah program-program yang ada di aspek ekonomi dan lingkungan.

## KESIMPULAN

Penilaian efektivitas pemberdayaan masyarakat dalam program Gerdu kempling di Kelurahan Kemijen dilakukan dengan menghubungkan proses pemberdayaan masyarakat dalam Gerdu kempling dengan perubahan kondisi masyarakat (kemiskinan). Pada dasarnya mekanisme pelaksanaan Gerdu Kempling telah mengakomodasi terciptanya peluang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi diri dan lingkungannya. Secara umum pemberdayaan masyarakat dalam Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen cukup efektif yaitu 63% masyarakat yang mendapatkan bantuan program Geru Kempling mengalami peningkatan kondisi kualitas hidupnya setelah mendapat program bantuan Gerdu Kempling. Pengaruh dari program Gerdu Kempling bagi masyarakat miskin penerima manfaat di Kelurahan Kemijen paling besar pada pemberdayaan manusia yaitu aspek pendidikan dan kesehatan. Pemberdayaan yang dilakukan memberikan dampak yang positif bagi perbaikan kesehatan, pendidikan dan juga kualitas masyarakat miskin itu sendiri. Pemberdayaan lingkungan juga berpengaruh pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman sehingga masyarakat dalam menjalani kehidupannya lebih nyaman dan aman. Pemberdayaan ekonomi kurang berpengaruh terhadap pengentasan kemiskinan di Kelurahan Kemijen. Hal tersebut karena masyarakat belum mengaplikasikan bantuan yang mereka dapatkan untuk meningkatkan usaha dan pendapatan mereka.

Proses pemberdayaan masyarakat dalam Gerdu Kempling yang kurang efektif tersebut terutama disebabkan oleh kapasitas masyarakat yang belum mampu mengambil peran yang besar dalam pembangunan. Besar atau kecilnya peran masyarakat dalam membangun ditentukan oleh kemauan dan kemampuan masyarakat. Menurut Clegg dan Marginn dalam Lawson dan Kearns (2010:1462), pemberdayaan masyarakat muncul karena bentuk kekalahan dan tidak berdaya. Oleh karena

itu dikembangkan model pemberdayaan masyarakat yang mengacu pada teori kekuasaan (*power*). Masyarakat memiliki potensi untuk melakukannya dan kemampuan masyarakat yang menjadi pengaruh tergantung berbagai faktor yakni kapasitas, kepercayaan, sumber daya dan konteks organisasi sebagai pendukung. Untuk diberdayakan, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran kritis, memiliki kesempatan untuk membuat pilihan dan kemampuan untuk bertindak. Dalam proses pemberdayaan program Gerdu Kempling di Kelurahan Kemijen masyarakat sudah mempunyai kesadaran berubah atau meningkatkan hidup mereka dengan mengikuti setiap program yang dilaksanakan. Akan tetapi masyarakat kurang dilibatkan dalam menentukan program yang akan dilaksanakan di Kelurahan Kemijen. Hanya aparat pemerintah dan tokoh masyarakat sebagai perwakilan masyarakat miskin yang dilibatkan dalam membuat keputusan. Sehingga kegiatan atau bantuan yang diberikan kurang bermanfaat bagi mereka karena kurang sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat. Seperti yang dikemukakan oleh Somerville (1998:253) dalam Lawson dan Kearns (2010:5), bahwa dengan kunci pemberdayaan adalah menempatkan warga atau masyarakat dalam posisi di mana mereka dapat memilih cara yang mereka inginkan untuk terjadinya perubahan. Ini mungkin melibatkan individu-individu dalam masyarakat dalam memilih jenis yang mereka sukai dan keterlibatan pada tingkatan partisipasi.

Hal tersebut mengakibatkan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan bantuan yang diberikan masih sangat kurang. Masyarakat kurang bisa memanfaatkan bantuan untuk meningkatkan perekonomian mereka. Sehingga bantuan terkesan sia-sia dan tidak berdampak pada penyelesaian kemiskinan. Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat seperti itu yaitu, bantuan yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat,

kurangnya modal usaha (financial) dan sifat masyarakat yang malas berusaha.

## REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, dapat disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

1. Jenis program pengentasan kemiskinan yang dilaksanakan seharusnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat/keluarga miskin yang menjadi sasaran program. Melibatkan mereka dalam menentukan jenis program yang dibutuhkan merupakan salah satu kunci ketepatan menentukan jenis program yang dibutuhkan dan masyarakat/keluarga yang berhak menerima program tersebut.
2. Pemberdayaan dalam program pengentasan kemiskinan sebaiknya diposisikan sebagai proses, sehingga diharapkan masyarakat mengikuti setiap proses dalam pengentasan kemiskinan. Seperti masyarakat penerima manfaat ikut terlibat dalam memutuskan kegiatan atau program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini agar tujuan dari pemberdayaan masyarakat tercapai yaitu menjadikan masyarakat miskin yang tidak berdaya menjadi berdaya untuk keluar dari lingkaran kemiskinan.
3. Memberikan pendampingan kepada masyarakat setelah program Gerdu Kempling terlaksana. Sehingga masyarakat mempunyai keyakinan dan kemauan untuk memanfaatkan apa yang mereka peroleh guna meningkatkan taraf hidup mereka.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiyoso, Wignyo. 2009. *Menggugat Perencanaan Partisipatif dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: ITS Press.
- Akindola, Rufus B. 2009. *Towards a Definition of Poverty : Poor People's Perspectives and Implications for Poverty Reduction*. Journal of Developing Societies, Vol. 25 (2), hal. 121-150.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta
- Astuti, Winny. 2009. *Slum and Squatter Settlements in Surakarta (Institutional constraints and Potencies for self-help Housing Development) Dalam Prosiding Sustainable (slum upgrading in urban area) Informal settlements and affordable housing*. Di publikasikan oleh unit of research and empowerment of housing and human settlements resources PIPW LPPM UNS: ITS CIB REPORT PUBLICATION.
- Bappenas. 2004. *Rencana Strategik Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia*. Jakarta.
- Bappenas. 2007. *Laporan Perkembangan Pencapaian Millenium Development Goals Indonesia*. Jakarta:Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
- Mikkelsen, Britha. 2003. *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*. Terjemah: Matheos Nalle. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Mubyarto. 2003. "Penanggulangan Kemiskinan di Indonesia". *Jurnal Ekonomi Rakyat*, Th. 02/ April 2003.
- Lawson, Louise dan Ade Kearns. 2010. *Community Empowerment in The Context of the Glasgow Housing Stock Transfer*. Urban Studies, Vol.47 (7), Januari, hal. 1459-1478.
- Panudju, Bambang. 1999. *Pengadaan Perumahan Kota dengan Peran serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah*. Bandung: Penerbit Alumni.
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Tulus, Agus.1996. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- World Bank. 2001. *Causes of Poverty and a Framework for Action*. Chapter 2 in The World Development Report

2000.2001: Attacking Proverty. The  
World Bank/Oxford University Press